



REALISME DALAM DINAMIKA KEPUTUSAN ORGANISASI INTERNASIONAL: STUDI KASUS PADA KONFLIK SENGKETA LAUT NATUNA UTARA DENGAN TIONGKOK

Disusun Oleh Kelompok 7

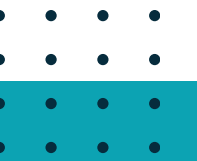




Makalah Presentasi

ANGGOTA KELOMPOK

Bella Aulia Salsabila 2156041021
Dinda Intan Dwi P 2156041007
Nadiyah Indriyani 2156041002
Tadzkia Alifvani 2156041028
Wike Hana Prabawati 2156041009





Makalah Presentasi

LATAR BELAKANG

Konflik Sengketa Laut Natuna Utara

Sengketa laut antara Indonesia dan Tiongkok, terutama di Natuna Utara, mencerminkan kompleksitas geopolitik di wilayah tersebut karena klaim tumpang tindih atas sumber daya alam. Meskipun Indonesia bertindak tegas dalam menjaga kedaulatan dan melakukan diplomasi, analisis realisme menyoroti dominasi kepentingan nasional dan kekuatan dalam keputusan organisasi internasional, yang memengaruhi respons kedua negara dalam menanggapi sengketa tersebut.





Makalah Presentasi

TINJAUAN PUSTAKA

➤ Teori Realisme

Teori realisme merupakan salah satu pendekatan utama dalam ilmu hubungan internasional yang menekankan pada kepentingan nasional, kekuatan, dan persaingan antarnegara sebagai faktor utama dalam hubungan internasional

➤ Dinamika Keputusan Organisasi Internasional

Dinamika keputusan organisasi internasional mengacu pada proses kompleks dan berkelanjutan yang mendasari bagaimana organisasi internasional membuat keputusan. Proses ini melibatkan berbagai aktor, faktor, dan pengaruh yang saling terkait dan terus berubah seiring waktu (Weiss & Saßmann, 2020).

➤ Konflik Sengketa Laut dalam Konteks Hubungan Internasional

Menurut Peatman (2020), konflik sengketa laut adalah pertentangan antar negara atas kepemilikan dan hak atas wilayah maritim, seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), landas kontinen, dan pulau-pulau.





PEMBAHASAN

✓ **Konflik Laut Natuna Utara dan Dinamika Keputusan Organisasi Internasional**

Tindakan China dalam membangun infrastruktur dan fasilitas militer di wilayah ini meningkatkan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga kepentingan nasionalnya di tengah persaingan antara negara-negara besar tersebut.

Beberapa keputusan penting organisasi internasional terkait konflik di Laut Natuna Utara:

- A. Deklarasi ASEAN tentang Laut China Selatan (1992): ASEAN menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan melalui dialog dan negosiasi.
- B. UNCLOS: Perjanjian internasional yang mengatur hukum laut, telah diratifikasi oleh Indonesia dan Tiongkok. Indonesia menggunakan UNCLOS sebagai dasar hukum untuk klaimnya di Laut Natuna Utara.
- C. Putusan Arbitrase atas Sengketa Laut China Selatan (2016): Putusan arbitrase memenangkan Filipina dalam sengketa dengan Tiongkok. Meskipun tidak langsung mengikat Indonesia, putusan ini memperkuat argumen Indonesia bahwa klaim Tiongkok atas Laut Natuna Utara tidak memiliki dasar hukum.





PEMBAHASAN

✓ Peran Dominasi Kepentingan Nasional dan Kekuatan dalam Membentuk Keputusan Organisasi Internasional dalam Penyelesaian Konflik

Dominasi kepentingan nasional dan kekuatan negara-negara kuat memainkan peran penting dalam pembentukan keputusan organisasi internasional dalam penyelesaian konflik. Contohnya, ASEAN dan PBB berusaha menangani sengketa di Laut Natuna Utara, tetapi terbatas oleh kekuatan dan kepentingan nasional anggotanya. Indonesia mengadopsi tiga pola diplomasi pertahanan maritim untuk menyelesaikan sengketa, termasuk kerja sama bilateral, multilateral, dan mengacu pada hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Tantangan ke depan termasuk penangkapan ikan ilegal dan penegakan hukum di Laut Natuna Utara.





PEMBAHASAN

✓ Analisis Realisme dalam Konflik Sengketa Laut di Natuna Utara

Konflik Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Tiongkok mewakili dinamika Realisme dalam hubungan internasional, di mana persaingan kekuasaan, keamanan negara, dan ekspansi kepentingan nasional memainkan peran utama. Tiongkok mengejar klaim wilayah ekspansionis untuk mengamankan sumber daya alam dan memperkuat pengaruh regionalnya, terutama dalam mengendalikan jalur pelayaran strategis. Indonesia telah mengambil langkah-langkah diplomatik dan militer untuk menegaskan kedaulatannya, termasuk pengiriman nota protes, kunjungan presiden, dan peningkatan pertahanan laut di Natuna Utara. Peran PBB dalam konflik ini terbatas pada fasilitasi dan mediasi, tanpa kewenangan untuk memaksa solusi, tetapi mendorong penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional.





Makalah Presentasi

KESIMPULAN

Konflik di Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Tiongkok mencerminkan kompleksitas geopolitik Asia-Pasifik. Perspektif realisme menyoroti persaingan kekuasaan antara Tiongkok dan upaya mereka untuk mengendalikan sumber daya alam dan jalur pelayaran. Indonesia menggunakan diplomasi maritim dan dukungan internasional untuk mempertahankan kedaulatannya. Penyelesaian konflik memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan kepentingan nasional, kekuatan militer, dan upaya diplomasi berkelanjutan.

